



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 739 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024-2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah, perlu ditetapkan Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2025;
- b. bahwa Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

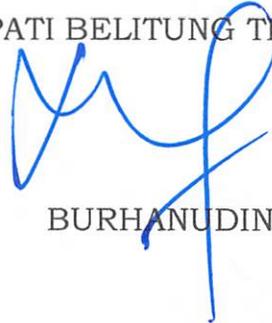
5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024-2025.
- KESATU : Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2025, dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 188.45- 739 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 - 2025

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Keuangan | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Pembuatan Produk Hukum Daerah | Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Analisis Standar Belanja) | Ketepatan waktu penyusunan KUA PPAS, Ketepatan Waktu Penyusunan RKA, Ketepatan waktu penyampaian Raperda | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 dan 2025 | - Anggaran bersumber dari APBD - Pengintegrasian dalam RKPD, KUA PPAS, dan RKA |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Keuangan | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pembuatan Produk Hukum Daerah | Dokumen Standar Harga yang Disusun | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah yang akuntabel, efektif dan efisien, Jumlah aset tanah pemda yang bersertifikat, Batas waktu penyampaian laporan BMD, | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 dan 2025 | - Anggaran bersumber dari APBD - Pengintegrasian dalam RKPD, KUA PPAS, dan RKA |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|--|---|--|---|--|---|-------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Jumlah aset tanah dan bangunan yang dimanfaatkan | | | |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Keuangan | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Pembuatan Produk Hukum Daerah | Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Kemandirian Keuangan Daerah | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 dan 2025 | - Anggaran bersumber dari APBD - Pengintegrasian dalam RKPD, KUA PPAS, dan RKA |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Perencanaan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 | Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 | Dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun tepat waktu | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 | Anggaran bersumber dari APBD |
| 5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi Promosi dan Penghargaan | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Latihan Kepemimpinan | PNS yang Lulus pelatihan | Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | Kerja Sama Wajib | 2024 | Anggaran bersumber dari APBD |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi Promosi dan Penghargaan | Kepegawaian Daerah | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Pendidikan Lanjutan | PNS yang mendapatkan pendidikan lanjutan | Peningkatan Pendidikan PNS | Kerja Sama Wajib | 2024 | Dukungan Stakeholder terkait |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|-----------------------------------|---------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 7 | Dinas Pendidikan | Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jaringan Internet dan Aplikasi <i>iSchool</i> | Tersedianya jaringan internet dan aplikasi berbasis digital di Satuan Pendidikan | Terintegrasai dan optimalnya pembelajaran berbasis digital di satuan pendidikan | Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 2024 | Anggaran Bersumber dari APBD |
| 8 | Dinas Pendidikan | Pendidikan | Penunjang Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui <i>Degree</i> dan <i>Non Degree Training</i> dan Pengembangan Sistem Informasi | Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui <i>Degree</i> dan <i>Non Degree Training</i> dan Pengembangan Sistem Informasi | Tersedianya SDM yang mumpuni dan sistem informasi yang efisien dan efektif | Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 2024 dan 2025 | Anggaran Bersumber dari APBD |
| 9 | Dinas Pendidikan | Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan | Replikasi Gerakan KUDU Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah) Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung program Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur | Pemanfaatan Replikasi Gerakan KUDU Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah) Kabupaten Pekalongan dan pemanfaatan aplikasi yang berkenaan dalam rangka mendukung | Menurunnya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Belitung Timur | Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 2024 dan 2025 | Anggaran Bersumber dari APBD |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|--------------------------|---------|----------|---|--|--|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | Program Yuk Sekula melalui jalur pendidikan formal dan non formal | | | | |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Bidang Koperasi dan UMKM | - | - | Kerja sama untuk ekspedisi pengiriman harga untuk pelaku UMKM di Kabupaten Belitung Timur | Terlaksananya ekspedisi pengiriman harga yang berlaku untuk pelaku UMKM di Kabupaten Belitung Timur | Meningkatnya volume untuk pengiriman produk UMKM di Kabupaten Belitung Timur | Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 2024 | Anggaran Bersumber dari APBD |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Bidang Koperasi dan UMKM | - | - | Kerja sama dalam hal pemasaran produk dan <i>packaging</i> | Terlaksananya kerja sama pemasaran produk dan <i>packaging</i> produk UMKM Kabupaten Belitung Timur dengan PLUT Kabupaten Belitung | Meningkatnya produksi produk UMKM dan kualitas <i>packaging</i> untuk UMKM di Kabupaten Belitung Timur | Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 2024 | Anggaran Bersumber dari APBD |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Bidang Koperasi dan UMKM | - | - | Kerja sama dalam hal pemasaran produk UMKM Kabupaten Belitung Timur | Tersedianya sarana/prasarana untuk penitipan produk UMKM di Kabupaten Belitung Timur | Meningkatnya kualitas pemasaran/promosi produk UMKM di Kabupaten Belitung Timur | Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 2024 | Anggaran Bersumber dari APBD |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pengiriman Pos dan Logistik | Tersedianya Jasa Pengiriman Pos dan Logistik | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran bersumber dari APBD - Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 14 | Dinas Pertanian dan Pangan | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pengiriman Pos dan Logistik | Tersedianya Jasa Pengiriman Pos dan Logistik | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran bersumber dari APBD - Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 15 | Dinas Pertanian dan Pangan | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota | Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah | Tersedianya Cadangan Pangan (Beras) Daerah | Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan (Beras) | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran bersumber dari APBD - Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 16 | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan | - | - | Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta Pengembangan Sumber Daya Manusia | Tersinergikannya potensi dan sumber daya yang dimiliki para pihak untuk mengembangkan kemampuan, mewujudkan | Meningkatnya mutu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 | |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|---|--|--|--|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | kepedulian serta memupuk hubungan antara Kabupaten Belitung Timur dengan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung dalam hal pelaksanaan peningkatan mutu Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | | | | |
| 17 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Analisis Data Indikator Kinerja Sektor Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Tersedianya Data Indikator Kinerja Sektor Perikanan (Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, Tingkat Konsumsi Ikan) | Meningkatnya pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan lebih | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024-2025 | Anggaran bersumber dari APBD Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|---|--------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | terukur | | | |
| 18 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyusunan Dokumen Kajian Rencana Pelabuhan Perikanan | Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Pelabuhan Perikanan | Meningkatnya Data Dukung Perencanaan Sarana dan Prasarana Perikanan | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 | Anggaran bersumber dari APBD Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 19 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan | Tersedianya Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Nelayan | Meningkatnya Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024-2025 | Anggaran bersumber dari APBD Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 20 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penyusunan Dokumen Kajian Data Statistik Perikanan Budidaya | Tersedianya Dokumen Kajian Data Statistik Perikanan Budidaya | Meningkatnya jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan yang tersedia | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 - 2025 | Anggaran bersumber dari APBD Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 21 | Dinas Perikanan Kabupaten | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan | Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penyusunan Dokumen Kajian Data Produksi | Tersedianya Dokumen Kajian Data | Meningkatnya Produksi Perikanan | Kerja Sama Pihak | 2024 | Anggaran bersumber dari APBD |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | Belitung Timur | dan Perikanan | | | Perikanan Budidaya di UPT Balai Perikanan Budidaya Unit Tawar, Payau dan Laut | Produksi Perikanan Budidaya di UPT Balai Perikanan Budidaya Unit Tawar, Payau dan Laut | Budidaya | Ketiga | | Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 22 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Sinergi dan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Kabupaten Belitung Timur, meliputi kegiatan: | a. Terbentuknya Jejaring gabungan reaksi cepat Perkarantina an Ikan; | Meningkatnya Sinergi dan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024-2025 | Anggaran bersumber dari APBD |
| | | | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | a. Pembentukan Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Perkarantinaan Ikan; | b. Terbentuknya jejaring gabungan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; | | | | Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| | | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha | b. Pembentukan Jejaring Gabungan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; | c. Terpenuhinya pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur; | | | | |
| | | | | Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | c. Koordinasi penguatan pelaksanaan | c. Tersedianya data dan informasi; | | | | |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|--|--|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | <i>quality assurance</i> serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; | | | | | |
| | | | | | d. Penanganan tanggap darurat kasus kematian ikan dan/atau mutu hasil perikanan berdasarkan laporan masyarakat baik yang melalui sistem elektronik maupun secara langsung; | d.Terlaksananya Studi Tiru (<i>Benchmarking</i>) dan/atau replikasi inovasi; | | | | |
| | | | | | e. Pemanfaatan bersama aplikasi SAOLIN; | e.Termanfaatkannya sarana dan prasarana di bidang perkarantina-an ikan; | | | | |
| | | | | | f. Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dalam bidang perkarantina-an ikan melalui pengenalan dasar Cara Karantina | f.Termanfaatkannya sarana dan prasarana di bidang penjaminan mutu dan keamanan hasil | | | | |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|--|---|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | Ikan Yang Baik (CKIB); | perikanan; | | | | |
| | | | | | g. Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur dalam sistem penjaminan mutu melalui pengenalan dasar cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di supplier; Penerapan program manajemen mutu terpadu berbasis HACCP; | g. Terlaksananya pemeriksaan bersama di Pos Pemeriksaan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu). | | | | |
| | | | | | h. Penyadartahuan informasi, regulasi, dan/atau sistem perkarantinaan ikan dan mutu; | | | | | |
| | | | | | i. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Ikan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan/atau | | | | | |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | perikanan sebagai data dukung penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan antar area (KI-D2) dan/atau <i>Health Certificate</i> (KI-D1); | | | | | |
| | | | | | j. Pelaksanaan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina; inventarisasi bersama Jenis Agen Berbahaya dan Invasif (JABI); dukungan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sesuai INPRES 01 Tahun 2017; | | | | | |
| | | | | | k. Pelaksanaan Studi Tiru (<i>Benchmarking</i>) dan/atau replikasi inovasi; | | | | | |
| 23 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha | Bimbingan Teknis Pengujian Produk Hasil Perikanan | Tersedianya SDM Perikanan yang berkualitas dan | Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan (UPI) | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2025 | Anggaran bersumber dari APBD |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|--|---|---------------------|---|
| | | | | Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Program Inkubasi Bisnis Hasil Perikanan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan (UPI) Diversifikasi Produk Penyebarluasan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | produk perikanan yang lebih beragam, bermutu dan berdaya saing | dan Nilai Tambah Produk Perikanan | | | Pengintegrasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 24 | Dinas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Pemeriksaan Sampel Air Baku dan Pemeriksaan Sampel Air Sungai | Terdatanya Kualitas Air Baku dan Air Sungai untuk 3 Sungai dan 14 Sumber Air Baku | Terpantaunya Kulit Air Sungai di Kabupaten Belitung Timur | - Kerja Sama Wajib - Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 dan 2025 | Sumber Anggaran APBD dan APBN |
| 25 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Perdagangan | Standardisasi dan perlindungan konsumen | Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan | Perusahaan yang memiliki Alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya | UTTP bertanda tera sah | Meningkatnya jumlah UTTP bertanda tera sah pada perusahaan | Kerja sama Wajib (Kota Pangkal Pinang, Kab. | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber dari APBD • Pengintegrasian dalam |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|--|---------------------|---|---|---|--|---|---|---------------------|---|
| | | | | | (UTTP) | | | Belitung) | | RKPD dan RPJMD |
| 26 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Perdagangan | Standardisasi dan perlindungan konsumen | Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan | Beasiswa di Akademi Metrologi untuk Pelajar Lulusan SMU Sederajat | SDM yang berkompeten di bidang tera | Terpenuhinya SDM penera di Kabupaten Belitung Timur | Sinergi Kemenpe-rindag RI dan Akademi Metrologi Bandung | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber dari APBD • Penginteg-rasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 27 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Perdagangan | Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota | Pengadaan beras, gula, terigu dan minyak goreng | Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap harga rata-rata nasional | Meningkatnya jumlah masyarakat yang terbantu kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Kerja Pihak Ketiga (Perum Bulog KCP Belitung) | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber dari APBD • Penginteg-rasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 28 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Perdagangan | Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat pasar kabupaten/kota | Pendistribusian beras, gula, terigu dan minyak goreng ke desa se-Kabupaten Belitung Timur | Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap harga rata-rata nasional | Tercapainya target pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akan disalurkan ke masyarakat | Kerja Pihak Ketiga (PT. Pos Belitung) | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber dari APBD • Penginteg-rasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 29 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur | Urusan Sosial | Program Pemberdayaan Sosial | Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | Pendidikan dan Pelatihan Bagi PSM dan TKSK | Terlaksananya Diklat ASN dan PSM serta TKSK se-Kabupaten Belitung Timur | Meningkatnya kualitas SDM Dinas Sosial P3A Kab. Belitung Timur | Kerja Sama Wajib | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber dari APBD • Penginteg-rasian dalam RKPD dan RPJMD |
| 30 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan | Urusan Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin | Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin | Tersalurkannya bantuan sosial kepada | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bersumber |

| NO | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | URUSAN PEMERINTAHAN | PROGRAM | KEGIATAN | POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME) | JENIS KERJA SAMA DAERAH | PELAKSANAAN (TAHUN) | DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|----|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|---------------------|------------------------------|
| | Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur | | | Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | masyarakat miskin Kabupaten Belitung Timur | miskin | | | dari APBD |
| 31 | Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur - Bagian Hukum | Pemerintahan Umum | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Penanganan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin | Jumlah penanganan perkara pada masyarakat miskin yang terselesaikan | Terlaksananya penanganan bantuan hukum kepada masyarakat miskin | Kerja Sama Pihak Ketiga | 2024 dan 2025 | Anggaran bersumber dari APBD |
| 32 | Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur - Bagian Hukum | Pemerintahan Umum | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Pencegahan/ penanganan/ pendampingan permasalahan hukum terkait perdata dan tata usaha negara | Jaminan dalam upaya penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pencegahan/ penanganan/ pendampingan permasalahan hukum terkait perdata dan tata usaha negara | Sinergi dengan Instansi Vertikal (Kejaksaan Negeri Belitung Timur) | 2024 dan 2025 | Anggaran bersumber dari APBD |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN